

Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2017-2021

Evanty Caesarisma^{1*}, Hamrullah²

¹Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Hasanuddin, Indonesia.

evantyy.caesarisma00@gmail.com

²Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. hamrullah.feunhas@yahoo.com

*Email Korespondensi: evantyy.caesarisma00@gmail.com

ABSTRACT

Income inequality is the difference in income between residents of districts/cities within the same province and can be influenced by economic factors, measured by the Gini index (index). Income inequality is a problem that exists in every country and is an ongoing problem so that it becomes a problem that must be addressed immediately. The income gap between residents of a region can be seen from the Gini index, which is uneven in West Java Province, which affects people's welfare. Therefore, this study aims to understand the factors causing income inequality in districts/cities in West Java Province in the 2017-2021 period. This research uses panel data with a total sample of 27 districts/cities with a period of 5 years. The analysis model used is multiple regression. The results of this study indicate that economic growth, poverty rate and regional minimum wages have a positive effect simultaneously but not partially significant. It is hoped that this research can become literature for further research on income inequality as well as input for local governments in overcoming income inequality.

Keywords : Income Inequality, Economic Growth, Poverty Rate, Regional Minimum Wage.

ABSTRAK

Ketimpangan pendapatan adalah selisih pendapatan antara penduduk kabupaten/kota dalam provinsi yang sama dan dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang diukur dengan indeks gini (indeks). Ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang ada di setiap negara dan merupakan masalah yang berkelanjutan sehingga menjadi masalah yang harus segera diatasi. Kesenjangan pendapatan antarpenduduk suatu wilayah dapat dilihat dari indeks gini yang tidak merata di Provinsi Jawa Barat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ketimpangan pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2017-2021. Penelitian ini menggunakan data panel dengan jumlah sampel sebanyak 27 kabupaten/kota dengan jangka waktu 5 tahun. Model analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan upah minimum regional berpengaruh positif

secara simultan tetapi tidak signifikan secara parsial. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya tentang ketimpangan pendapatan serta masukan bagi pemerintah daerah dalam mengatasi ketimpangan pendapatan.

Kata Kunci : Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Upah Minimum Regional.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi selalu menjadi tolak ukur keadaan perekonomian suatu wilayah, struktur ekonomi dan semakin tereduksinya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Setiap wilayah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya dapat diukur dengan pembangunan ekonomi melalui Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan tujuan yang sama yakni menekan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Indeks ketimpangan yang lazim dikenal dengan “Koefisien Gini” mencerminkan ketimpangan pendapatan masyarakat dibandingkan dengan pendapatan masyarakat lainnya yang apabila skalanya mendekati nol mengindikasikan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Perbedaan pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak perbedaan tingkat kesejahteraan daerah, yang pada akhirnya akan menyebabkan ketimpangan pendapatan antar daerah, dengan kata lain ketimpangan pendapatan suatu daerah semakin besar.

Permasalahan terkait ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan yang ada di setiap negara dan merupakan permasalahan yang berkelanjutan sehingga menjadi permasalahan yang harus segera diatasi. Kesenjangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah dapat dilihat dari indeks gini yang tidak merata di berbagai Provinsi di Indonesia sehingga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Jika pendidikan meningkatkan pendapatan seiring dengan peningkatan distribusi pendapatan, peningkatan pendapatan karena pendidikan lebih tinggi di atas distribusi pendapatan, yang menyebabkan ketimpangan pendapatan. Jika peningkatan pendapatan karena pendidikan lebih tinggi di atas distribusi pendapatan, yang menyebabkan ketimpangan pendapatan. Hal tersebut memerlukan upaya dari pemerintah dalam mengambil kebijakan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan berbagai usaha dalam rangka peningkatan distribusi pendapatan dari berbagai aspek.

Perekonomian daerah yang tinggi tidak menjamin adanya pemerataan pendapatan, namun pertumbuhan ekonomi yang pesat tetap dipandang sebagai strategi unggulan pembangunan ekonomi. Padahal, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan percepatan tidak menghilangkan ketimpangan. Perbedaan paling nyata dalam pembangunan adalah pada aspek pendapatan yang melahirkan kelompok kaya dan miskin, pada aspek spasial yang mengarah pada daerah maju dan tertinggal, dan pada aspek sektoral yang menghasilkan sektor unggulan dan non unggulan. Untuk melihat seberapa timpang pendapatan yang terjadi berdasarkan Provinsi di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data gini ratio dengan nilai tertinggi pada tahun terakhir yakni 2021.

Tabel 1.1
Indeks Gini Tertinggi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2021

PROVINSI	INDEKS GINI
	TAHUN
	2021
DI YOGYAKARTA	0,436
DKI JAKARTA	0,411
GORONTALO	0,409
JAWA BARAT	0,406
PAPUA	0,396
SULAWESI TENGGARA	0,394
NUSA TENGGARA BARAT	0,384
SULAWESI SELATAN	0,377
BALI	0,375
PAPUA BARAT	0,374

Sumber : Badan Pusat Statistik

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 terdapat 10 Provinsi yang memiliki indeks gini yang paling tinggi berdasarkan data tahun terakhir, Provinsi Jawa Barat salah satunya dengan indeks gini tahun terakhir sebesar 0,406 bahkan lebih besar dibandingkan indeks gini secara nasional (Indonesia) data tahun terakhir yakni sebesar 0,381. Nilai indeks gini memiliki nilai 0 hingga 1, semakin tinggi indeks gini maka dapat dikatakan semakin tinggi ketimpangan yang terjadi di wilayah tersebut.

Gini ratio Provinsi Jawa Barat diberitakan selalu berada diatas gini ratio Indonesia. Berikut merupakan perbandingan nilai gini ratio Provinsi Jawa Barat dengan gini ratio Indonesia selama

5 tahun terakhir. Ketimpangan pendapatan yang ada di Jawa Barat cukup serius untuk diperhatikan, jika tidak tangani dengan mencari tahu faktor penyebab ketimpangan Jawa Barat, akan berpotensi memiliki dampak.

Tabel 1.2
Perbandingan Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Indonesia
Tahun 2017-2021

	INDEKS GINI				
	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
JAWA BARAT	0,403	0,407	0,402	0,403	0,406
INDONESIA	0,393	0,384	0,380	0,385	0,381

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik selama 5 tahun terakhir, indeks gini Provinsi Jawa Barat tidak pernah berada dibawah indeks gini Indonesia. Indeks gini Provinsi Jawa Barat selalu menyentuh hingga angka 0,400. Sedangkan indeks gini Indonesia tidak pernah menyentuh angka 0,400, indeks tertinggi yang dicapai Indonesia selama 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 sebesar 0,393.

Indeks gini tidak berimbang dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat umumnya berada di atas tingkat nasional. Dapat dikatakan bahwa Provinsi Jawa Barat gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam proses pembangunannya, atau pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tidak menghasilkan pertumbuhan yang inklusif. Sering terjadi *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Menurut Kanbur (2010), pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan yang dapat meningkatkan pemerataan dan aksesibilitas untuk semua dan pertumbuhan inklusif mencerminkan pertumbuhan yang dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Sehingga nantinya pertumbuhan inklusif ini mengatasi permasalahan pembangunan melalui prinsip peningkatan pertumbuhan (*pro-growth*), penciptaan lapangan kerja (*pro-job*) dan penyeimbangan ketimpangan dan kemiskinan (*pro-poor*).

Kemerataan distribusi pendapatan merupakan salah satu target atau tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan, dimana distribusi pendapatan merupakan pembagian penghasilan atau pemerataan pendapatan di suatu wilayah bertujuan untuk menekan tingkat kesenjangan di dalam

masyarakat. Dalam proses produksi, pemilik faktor produksi akan menerima kompensasi atas faktor produksi yang berkontribusi dalam proses produksi. Proses distribusi pendapatan ini akan berlangsung dalam siklus (perputaran) konsumen yang harus membayar harga barang. Tetapi di sisi lain, menjadi pemasok faktor modal, tenaga kerja, sumber daya alam atau faktor jasa sehingga, akan menerima sebagian dari pendapatan pada waktu tertentu dan membayar harganya pada waktu lain. Teori Kuznets menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki hubungan lurus dengan pertumbuhan ekonomi, pada saat produktivitas tenaga kerja meningkat akan mempengaruhi output, meningkatnya output terindikasi bahwa pekerja wilayah sekitar produktif dan memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, hingga menurunkan tingkat kemiskinan. Output tersebut akan dihitung dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah dan akan mengurangi tingkat perbedaan pendapatan. Disisi lain dalam teori ekonomi neoklasik berpendapat bahwa upah minimum dapat meningkatkan daripada mengurangi ketimpangan pendapatan. Upah minimum menyebabkan, non-pasar, berperan dalam menentukan ambang batas upah minimum di pasar tenaga kerja, membuat harga tenaga kerja lebih mahal. Jika harga pekerja naik, upah minimum akan menyebabkan penurunan permintaan pekerja dan pekerja akan kehilangan pekerjaan.

Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan kemakmuran kondisi perekonomian di dalam masyarakat suatu wilayah. Ketimpangan pendapatan terjadi karena adanya perbedaan pendapatan. Menurut Sukirno (2006), ketimpangan pendapatan merupakan suatu konsep yang membahas tentang persebaran pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat.

Ketimpangan pendapatan ditentukan oleh tingkat pembangunan suatu negara, heterogenitas etnis, dan adanya kediktatoran dan pemerintahan yang gagal. Ketimpangan pendapatan muncul pada tahap awal pertumbuhan ekonomi. Pada titik ini, distribusi pendapatan akan memburuk, tetapi tahap selanjutnya akan meningkatkan distribusi pendapatan, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Simon Kuznets berpendapat bahwa distribusi pendapatan cenderung menjadi lebih buruk, atau tidak merata pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, tetapi membaik pada tahap selanjutnya. Pembangunan ekonomi pada tahap awal mengalami proses penurunan yang cukup besar dalam distribusi pendapatan, pada saat terjadinya pembangunan yang lebih meningkat garis ketimpangan berbalik menuju tingkat ekuitas yang lebih tinggi dalam pembagian pendapatan. Pada kurva yang ditunjukkan oleh Kuznets,

menunjukkan bahwa dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan per kapita dengan ketimpangan pendapatan, sebaliknya dalam jangka panjang antara keduanya menjadi korelasi negatif. Kurva Kuznets biasanya dikenal dengan kurva “U-terbalik”.

Menurut Todaro (2003), alasan mengapa pada tahap awal pembangunan distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun kemudian membaik, ini dikaitkan dengan kondisi-kondisi dasar perubahan yang bersifat struktural. Menurut model Lewis, tahapan pertumbuhan awal akan terpusat pada pencarian tenaga kerja ahli dimana hal tersebut menghasilkan lapangan kerja terbatas namun tingkat upah dan produktivitas terhitung tinggi. Kurva Kuznets dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan struktur, seiring dengan perkembangan sebuah negara dari perekonomian tradisional ke perekonomian modern. Ketimpangan tidak bisa diberantas, hanya bisa direduksi ke tingkat yang dapat diterima oleh nilai tertentu sehingga keseimbangan dalam struktur pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Oleh karena itu, tidak heran jika ketimpangan akan selalu ada, baik itu di negara miskin, negara berkembang, bahkan negara maju. Hanya saja perbedaannya adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi di masing-masing negara tersebut. Jika ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh semua lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan telah terjadi ketimpangan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan suatu wilayah Adelman dan Morris (1973).

- a) Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan menurunnya pendapatan perkapita.
- b) Inflasi, dimana masyarakat memegang uang tetapi tidak diikuti dengan penambahan produksi barang.
- c) Ketidakmerataan pembangunan wilayah.
- d) Banyaknya investasi dalam proyek yang padat modal (*Capital Intensive*), sehingga tingkat pendapatan modal dari kerja tambahan lebih besar dibandingkan tingkat pendapatan orang yang bekerja, yang dapat memicu meningkatnya pengangguran.
- e) Kurangnya mobilitas sosial.
- f) Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.

- g) Menurunnya nilai tukar (*Term of Trade*) bagi negara berkembang dalam melakukan perdagangan dengan negara maju, akibat ketidakelestarian permintaan di negara maju terhadap barang ekspor negara berkembang.
- h) Menurunnya produktifitas industri kreatif.

Beberapa metode yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan, yaitu:

a) Menurut Bank Dunia

Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok dengan pendapatan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk secara menyeluruh.

1. Tingkat ketimpangan berat, apabila 40% penduduk paling miskin menerima $< 12\%$ dari pendapatan nasional.
2. Tingkat ketimpangan sedang, apabila 40% penduduk paling miskin menerima 12-17% dari pendapatan nasional.
3. Tingkat ketimpangan ringan, apabila 40% penduduk paling miskin menerima $> 17\%$ dari pendapatan nasional.

b) Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menunjukkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di seluruh populasi. Kurvanya berbentuk persegi panjang, dengan sisi vertikal mewakili persentase kumulatif pendapatan nasional dan sisi horizontal mewakili persentase kumulatif populasi. Kurva ditempatkan secara diagonal di bujur sangkar tersebut. Semakin dekat kurva Lorenz ke diagonal (linier), semakin seragam distribusi pendapatan nasional, sebaliknya, semakin jauh Kurva Lorenz dari diagonal (melengkung) maka semakin menunjukkan ketimpangan pendapatan yang tinggi dan distribusi pendapatan nasional semakin timpang.

c) Indeks Gini

Koefisien Gini atau Gini Index digunakan untuk mengetahui hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan.

Koefisien Gini dihitung dengan akumulasi luas antara diagonal dan Kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total setengah persegi di mana kurva Lorenz berada.

Tabel 2.1
Ukuran Nilai Indeks Gini

Nilai Koefisien	Distribusi pendapatan
< 0,4	Tingkat Ketimpangan Rendah
0,4 – 0,5	Tingkat Ketimpangan Sedang
> 0,5	Tingkat Ketimpangan Tinggi

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), nilai rasio gini berkisar antara 0 sampai dengan Nilai rasio gini yang mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin besar. Rasio gini dengan nilai 0, menunjukkan bahwa pendapatan terdistribusi sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kemajuan suatu wilayah. Singkatnya, pertumbuhan ekonomi dapat diperiksa dengan mencapai total Produk Domestik Bruto atau PDB suatu wilayah dengan komponen pertumbuhan ekonomi. Menurut Sukirno (2006), alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Perekonomian wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ketahun dikarenakan adanya penambahan pada faktor produksi. Kuznets optimis bahwa pertumbuhan ekonomi justru mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

Menurut Ritonga (2003), kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan dimana seorang individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum atau layak. Kebutuhan dasar minimum yang dimaksud adalah kebutuhan penduduk atau rumah tangga dalam hal pangan, sandang, dan kebutuhan sosial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara memadai.

Menurut Remi dan Tjiptoherijanto (2002), penyebab utama kemiskinan rumah tangga adalah pendapatan yang rendah. Di sisi lain, ciri orang miskin adalah jumlah anggota keluarga yang banyak. Jumlah keluarga merupakan indikator utama dari miskin atau tidaknya suatu keluarga. Namun, alasannya bervariasi dari situasi ke situasi. Secara umum, karakteristik pertumbuhan ekonomi wilayah hampir identik dengan tingkat pendapatan nasional yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang lambat atau stagnan. Teori Nurkse menyatakan bahwa, kemiskinan bertumpu pada teori lingkaran setan kemiskinan, adanya ketidaksempurnaan pasar hingga

keterbelakangan sumber daya manusia akan menyebabkan produktifitas rendah. Rendahnya produktifitas akan mengakibatkan pendapatan yang diterima juga rendah.

Dalam Kuncoro (1997), mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari sudut pandang ekonomi. Pertama, kemiskinan tingkat mikro menghasilkan distribusi pendapatan yang tidak merata karena kepemilikan kekayaan yang tidak merata. Orang miskin memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitas yang rendah. Kedua, kemiskinan disebabkan oleh perbedaan kualitas sumber daya manusia. Pekerja yang berkualitas rendah berarti produktivitas yang lebih rendah, yang pada gilirannya mengurangi upah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan disebabkan oleh perbedaan akses permodalan. Faktor penyebab kemiskinan tersebut mengarah pada lingkaran setan teori kemiskinan. Kemiskinan memiliki arti yang luas, namun secara umum, ada dua jenis ukuran kemiskinan, yaitu:

1. Kemiskinan absolut berkaitan dengan standar hidup minimum dalam suatu masyarakat yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi masyarakat dan muncul dalam bentuk garis kemiskinan tertentu. Garis kemiskinan adalah kemampuan seseorang atau keluarga untuk memenuhi standar kebutuhan hidup untuk bertahan hidup dalam waktu dan tempat tertentu. Penetapan garis kemiskinan tergantung pada penentuan standar hidup minimum.
2. Kemiskinan relatif adalah seseorang yang sudah memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi masih dianggap miskin karena masih jauh lebih rendah dari keadaan di masyarakat sekitar. Menurut konsep ini, ketika standar hidup masyarakat berubah, garis kemiskinan juga berubah. Konsep ini merupakan penyempurnaan dari konsep kemiskinan absolut yang selalu hadir karena konsep kemiskinan relatif dinamis.

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang digabung upah pokok dan tunjangan tetap dari karyawan yang lebih rendah dan kurang dari satu tahun pengalaman kerja di wilayah tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja: PER/MEN/No.18 tahun 2022, tentang upah minimum, bahwa kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu upaya

mewujudkan hak pekerja/ buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam menjaga daya beli masyarakat.

Upah Minimum Regional (UMR) dibedakan menjadi dua, yaitu Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk. I) dan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk. II). istilah upah minimum regional Tingkat I (UMR Tk. I) diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional I Tingkat I (UMR Tk.II) juga mengalami perubahan menjadi Upah Minimum kabupaten/kota (UM kab./ kota) Upah minimum merupakan kebijakan yang berguna untuk memastikan pekerja mendapatkan upah yang adil bersamaan untuk mencegah kemiskinan di antara para pekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Waldman & Whalen (2007), upah minimum merupakan hal utama dalam penetapan upah secara nasional, tidak hanya itu tetapi upah dapat pula mempengaruhi pendapatan. Mereka yang bekerja di sektor formal menjadi sasaran kebijakan pengupahan minimum. Mereka tidak menerima upah kurang dari gaji upah minimum yang sah. Maka dari itu, upah minimum muncul untuk melindungi pekerja bagian bawah hingga sering menjadi isu kelas menengah.

Menurut Fachrurrozi (2014), upah dapat diartikan sebagai penghasilan yang diterima pekerja sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan. Upah muncul berdasarkan kontrak kerja yang disepakati, terlepas dari pekerjaannya dan demonisasinya. Pemberian upah baik dalam bentuk uang tunai maupun uang digital. Teori ekonomi neoklasik berpendapat bahwa upah minimum dapat meningkatkan daripada mengurangi ketimpangan pendapatan. Upah minimum menyebabkan pemerintah berperan dalam menentukan standar upah minimum di pasar tenaga kerja, jika digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan menyebabkan meningkatnya biaya produksi perusahaan yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi. Konsumen akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan barang, yaitu mengurangi konsumsi terhadap barang bahkan tidak lagi ingin membeli barang tersebut. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksi hingga ada kemungkinan perusahaan akan memutuskan kerja sama dengan tenaga kerja yang akan akan menyebabkan penurunan permintaan pekerja dan pekerja akan kehilangan pekerjaan. Menurut Rama (2001) peningkatan kebijakan upah minimum yang kurang dari 15% akan

menyebabkan penurunan lapangan kerja sebesar 5%, sehingga upah minimum memiliki manfaat bagi pekerja di bidang formal tetapi tidak dengan perusahaan kecil yang sangat bergantung pada tenaga kerja yang memiliki keterampilan rendah dan cenderung untuk berinvestasi di teknologi.

METODOLOGI KAJIAN

Dengan berdasar pada sumber, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. data kuantitatif yang terdiri dari Koefisien Gini Tahun 2017-2021, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku 2010, tahun 2017-2021, tingkat kemiskinan kabupaten/kota tahun 2017-2021 dan upah minimum kabupaten/kota tahun 2017-2021 di Provinsi Jawa Barat. Data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) serta *website* resmi Jabarprov.go.id yang berupa data panel, yaitu gabungan dari data *cross section* dan *time series*. Untuk data *cross section* menggunakan data dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sedangkan data *time series* menggunakan data dari Tahun 2017-2021.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data riset kepustakaan (*library research*). Riset kepustakaan yaitu pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan penulisan melalui literatur atau referensi kepustakaan. Beberapa sumber yang dimaksud seperti perpustakaan, jurnal, *website* Badan Pusat Statistik (BPS) dan Jabarprov.go serta berbagai sumber penerbitan seperti buku-buku ekonomi. Dalam penelitian ini pengujian menggunakan *software computer E-views 10* dan pembahasan analisis secara deskriptif. Ketimpangan pendapatan di Jawa Barat dipengaruhi oleh variabel-variabel ekonomi dan fungsinya ditunjukkan sebagai berikut.

$$Y = f(X_1, X_2, X_3) \dots\dots\dots(1)$$

$$Y = \alpha, X_{1it}^{\beta_1}, X_{2it}^{\beta_2}, X_{3it}^{\beta_3}, e \dots\dots\dots(2)$$

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \ln\beta_3 X_{3it} + e \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan :

Y = Ketimpangan pendapatan (Indeks)

X_1 = Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)

X_2 = Tingkat Kemiskinan (Persen)

X_3 = Upah Minimum (Juta Rupiah)

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

i = Data *Cross Section* kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat

t = Data *Time Series*, tahun 2017-2021

e = *error term*

HASIL KAJIAN DAN DISKUSI

Berikut hasil penelitian :

Variabel Penelitian	Koefisien Regresi	t-statistik	Probabilitas
Laju Pertumbuhan Ekonomi (X_1)	0,0293	0,7348	0,4641
Tingkat Kemiskinan (X_2)	0,0034	1,3180	0,1904
Upah Minimum Kabupaten/kota (X_3)	0,0018	0,4809	0,6315
C	0,3203	10,0416	0,0000
F-statistic = 9,7512 Prob (F-statistic) = 0,0000			
*) Signifikan pada $\alpha = 5\%$; $R^2 = 0,7292$			

Sumber data : Badan Pusat Statistik, *Eviews10*, diolah 2023.

Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian, maka dapat diketahui nilai Prob (F-statistic) sebesar $0.000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).

Hasil pengujian uji t yaitu, Variabel X_1 memiliki nilai probabilitas sebesar $0,464 >$ dari $0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (X_1) berpengaruh positif terhadap variabel ketimpangan pendapatan (Y) namun tidak secara parsial.

Variabel X_2 memiliki nilai probabilitas $0,1904$ dimana $>$ dari $0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat kemiskinan (X_2) berpengaruh positif terhadap variabel ketimpangan pendapatan (Y) namun tidak secara parsial.

Variabel X_3 memiliki nilai probabilitas $0,631$ dimana $>$ dari $0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel upah minimum (X_3) berpengaruh positif terhadap variabel ketimpangan pendapatan (Y) namun tidak secara parsial.

Berdasarkan hasil uji diketahui bahwa nilai R-Squared sebesar $0,7292$. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen (Y) secara serempak atau bersama-sama sebesar $72,92\%$ dan sisanya sebesar $27,08\%$ dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai dari statistik Jarque-Bera adalah $3,708$ sedangkan nilai probabilitas sebesar $0,1565$ memiliki nilai $>$ $0,05$. Hal ini berarti asumsi normalitas terpenuhi.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF (*centered VIF*) $<$ 10 . Oleh karena itu dari hasil pengujian multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

Hasil uji heteroskedestisitas menunjukkan hasil bahwa nilai probabilitas F sebesar $0,0674 >$ $0,05$ maka asumsi heteroskedastisitas tidak terjadi.

Berdasarkan hasil autokorelasi, nilai dari statistik Durbin-Watson menunjukkan angka 2,0153, karena nilai Durbin-Watson lebih besar dari satu, yakni $1 < 2,0153 < 3$, dan juga memiliki nilai $dU < 2,0153 < 3-dU$ maka model tidak mengalami gejala autokorelasi.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Nilai koefisiennya adalah 0,029 yaitu jika pertumbuhan ekonomi meningkat 1% maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan/ indeks gini sebesar 0,029 kali. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan berpengaruh positif. Menurut Todaro (2003), pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada fase pembangunan dapat diikuti oleh masalah ekonomi, kemiskinan hingga ketimpangan pendapatan karena tahapan pertumbuhan awal akan terpusat di sektor industri modern yang mempunyai lapangan kerja terbatas namun tingkat upah dan produktivitas terhitung tinggi.

Provinsi Jawa Barat belum menunjukkan pertumbuhan yang inklusif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, dimana pertumbuhan inklusif menitikberatkan salah satunya pada aspek pemerataan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh F. Ramadhan (2017) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen, yaitu pertumbuhan ekonomi, belanja daerah dan IPM berdampak positif terhadap kesenjangan pendapatan antar daerah. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis Kuznet valid dalam penelitian ini. Hal ini tercermin dari hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.

Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Nilai koefisiennya adalah 0,0034 yaitu jika tingkat kemiskinan meningkat 1% maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan/ indeks gini sebesar 0,0034 kali. Data tingkat kemiskinan pada tabel 4.3 dan indeks gini pada tabel 4.2, menjelaskan nilai

yang cenderung meningkat. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa hubungan tingkat kemiskinan dengan ketimpangan pendapatan berpengaruh positif.

Hal ini sesuai pula dengan penelitian Hindun et al. (2019) bahwa variabel kemiskinan berpengaruh positif terhadap perbedaan pendapatan. Sesuai pula dengan teori lingkaran setan kemiskinan oleh Nurkse (1961), yang menyatakan bahwa pada awalnya disebabkan oleh keterbelakangan sumber daya yang akan mengakibatkan produktifitas dan pendapatan yang lebih rendah.

Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Nilai koefisiennya adalah 0,0018 yaitu jika upah minimum meningkat Rp. 1.000,- maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan/ indeks gini sebesar 0,0018 kali. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa hubungan upah minimum dengan ketimpangan pendapatan berpengaruh positif. Data upah minimum pada tabel 4.4 dan indeks gini pada tabel 4.2, menjelaskan nilai yang cenderung meningkat.

Sesuai dengan teori neoklasik, upah minimum dapat meningkatkan daripada mengurangi ketimpangan pendapatan. Upah minimum menciptakan peran non-pasar dalam menetapkan ambang batas upah minimum di pasar tenaga kerja, yang meningkatkan harga tenaga kerja. Jika harga tenaga kerja naik, upah minimum mengurangi permintaan tenaga kerja dan pekerja kehilangan pekerjaan. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian SN Sungkar (2015), dengan hasil yang menunjukkan bahwa kedua variabel dalam penelitian ini secara signifikan memiliki hubungan yang positif, yang artinya peningkatan upah minimum akan menaikkan angka kesenjangan pendapatan atau memperbesar kesenjangan pendapatan. Peningkatan upah minimum memperlebar kesenjangan antara pekerja terbawah dan menengah. Kenaikan upah minimum yang cenderung meningkatkan tingkat upah rata-rata tidak dirasakan oleh pekerja golongan upah terendah, dimana kelompok ini didominasi oleh pekerja pedesaan yang berpendidikan kurang dari sekolah dasar (SD). Proporsi pekerja yang lebih tua (usia 60 keatas) relatif lebih tinggi daripada persentil upah lainnya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian analisis ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021 adalah berdasarkan *Fixed Effect Model* (FEM) terdapat hasil bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif dan dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

Adapun saran yang dapat peneliti berikan:

1. Pemerintah harus memahami potensi ekonomi masing-masing daerah untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi yang dapat digunakan sebagai dasar kemandirian ekonomi dan keuangan daerah serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tentunya harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, pendidikan dan kesehatan masyarakat serta gizi.
2. Mengendalikan angka kemiskinan melalui berbagai kebijakan yang menguntungkan tidak hanya sebagian masyarakat tetapi secara keseluruhan, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat yang daya saingnya rendah untuk mendapatkan pekerjaan sehingga akan menghasilkan pendapatan. Diharapkan juga masyarakat di sekitar lokasi penelitian dapat berpartisipasi dalam menciptakan lapangan kerja sendiri, yang akan mengurangi tingkat kemiskinan yang berbanding lurus dengan ketimpangan pendapatan.
3. Pemerintah harus menganalisis secara komperhensif tentang kebijakan tingkat upah minimum agar tidak memberikan dampak negative terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

REFERENSI

- [1] Adelman, I. dan C.T. Morris (1973). *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*, Stanford CA : Standford University Press.
- [2] Badan Pusat Statistik (BPS). (2017-2020). *Laju Pertumbuhan Jawa Barat*. Jawa Barat.
- [3] Badan Pusat Statistik (BPS). (2017-2020). *Indeks Gini Kabupaten/kota Jawa Barat*. Jawa Barat.

- [4] Badan Pusat Statistik (BPS) (2017-2020). Tingkat Kemiskinan Kabupaten/kota Jawa Barat. Jawa Barat.
- [5] Field. 2009. Autocorrelationstatistical value of the Durbin-Watson. 220.
- [6] Fachrurrozi, K. (2014). Pengaruh faktor sosial-ekonomi terhadap kriminalitas di Indonesia. Universitas Syiah Kuala
- [7] F. Fikri. (2017). Pengaruh Human Capital (Modal Manusia) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur.
- [8] Ghozali, Imam, 2013. Aplikasi Analisa Multivariat dengan Program SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro
- [9] HUMAS, JABAR. Upah Minimum Kabupaten/kota Jabar 2017-2021. [Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat | Upah Minimum Kabupaten/kota di Daerah Provinsi Jawa Barat \(jabarprov.go.id\)](#), diakses pada 17 Desember 2022.
- [10] Hanum, N. (2018). Analisis Kemiskinan dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kota Langsa (Studi Kasus Gampong Matang Seulimeng). 2(2).
- [11] H. Hindun, A. Seotojo, H. Hariyati (2019) Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, 8, 250.
- [12] Kuncoro. 1997. Pemberdayaan, Konsep dan Implementasi. Jakarta: CSIS.
- [13] Kanbur, R. 2010. “Inclusive Development: Two Papers on Conceptualization, Application and the ADB Perspective”. Asian Development Bank, Manila
- [14] M. Arif & Wicaksani (2017). Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, 323-328.
- [15] Pendapatan, K., Daerah, D. I., & Yogyakarta, I. (2019). 282 | DINAMIC: Directory Journal of Economic Volume 1 Nomor 3 Tahun 2019. 1, 282–293.
- [16] Rama, M. (2001). “The Consequences of Doubling the Minimum Wage”, Industrial and Labour Relations Review, Vol. 54, No. 4.
- [17] Remi, Sutyastie Soemitro dan Prijono Tjiptoherijanto. (2002). Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- [18] Ritonga, A. dkk. 2003. Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Cetakan Kedua. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- [19] Sukirno, Sadono. 2006. Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Kencana.

- [20] Sari Nurmalisa Sungkar; dkk. (2015). Pengaruh Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(2), 40–53.
- [21] Syawie, M. (2011). Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial. *Jurnal Informasi*, 16(3), 213–219.
- [22] Syahri, D., & Gustiara, Y. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara Periode 2015-2019. 1(1), 34–43.
- [23] Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, edisi delapan. Jakarta : Erlangga, 2003.
- [24] Todaro,MP. & Stephen C.S., (2008). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke sembilan. Jakarta: Erlangga
- [25] T. Nadhifah & M. Wibowo (2021). Determinan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 24, 39–52.
- [26] Universitas, P., Surabaya, N., Soejoto, A., Universitas, P., Surabaya, N., Universitas, P., & Surabaya, N. (2019). Pengaruh Pendidikan , Pengangguran , dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. 8(3), 250–265.
- [27] White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. *Econometrica*, 48(4), 817–838.
- [28] Waldman L. & Whalen C. (2007). University at Buffalo. The Minimum Wage is A Middle Class Issue. Vol. 50, issue 3. 59-71.
- [29] Yoertiara, R. F., & Feriyanto, N. (2022). *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan* Pengaruh pertumbuhan ekonomi , IPM , dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan Provinsi-Provinsi di pulau Jawa. 1(1), 92–100. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol1.iss1.art9>